

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari penelitian dan Analisa Bab II, dapat disimpulkan bahwa:

1. Investor yang melakukan transaksi melalui pialang yang tidak berizin tetap memperoleh perlindungan hukum.
2. Bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada investor yang menggunakan jasa pialang berjangka tidak berizin adalah perlindungan secara preventif yaitu dengan pemblokiran website secara berkala dengan koordinasi Kementerian Informasi dan Komunikasi bersama dengan Bappebti, sosialisasi dan edukasi, serta memberikan pengumuman entitas ilegal melalui siaran pres kepada investor. Perlindungan secara represifnya adalah investor dapat menuntut pembatalan perjanjian jual beli dan menuntut ganti rugi kepada Binomo apabila investor mengalami kerugian.

#### **B. Saran**

Berdasarkan penelitian dan kesimpulan yang didapatkan di atas, saran dari penulis adalah Bappebti harus lebih sigap dan proaktif dalam mengatasi pialang ilegal yang beredar di Indonesia dengan berbagai inovasi serta melakukan studi banding dengan negara lain dalam hal untuk memberikan kepastian hukum kepada investor.

Penulis menyarankan agar terciptanya kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi para investor maka diperlukan pembentukan regulasi terkait dengan perdagangan berjangka komoditi dengan sistem *binary option*, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat, serta mengadakan penyuluhan secara berkala dan konsisten kepada masyarakat mengenai perdagangan berjangka komoditi.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Alexander Thian, 2021, *Hukum Dagang*, Andi Offset, Yogyakarta.
- I Ketut Oka Setiawan, 2016, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Johannes Gunawan dan Bernadette M. Waluyo, 2021, *Perjanjian Baku Masalah dan Solusi.*, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Germany.
- Lukman Santoso, 2019, *Aspek Hukum Perjanjian*, Penebar Media Pustaka, Yogyakarta.
- Martha Eri Safira, 2017, *Hukum Dagang Dalam Sejarah Dan Perkembangannya Di Indonesia.*, Nata Karya, Ponorogo.
- Sentosa Sembiring, 2015, *Hukum Dagang*, Citra Aditya, Bandung.
- Siti Kotijah, 2020, *Hukum Perizinan Online Single Submission.*, Lingkar Media, Yogyakarta.
- Tedi Sudrajat dan Endra Wijaya, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintah.*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 2020, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Yapiter Marapi, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Transaksi E-Commerce.*, Zona Media Mandiri, Tasikmalaya.
- Yapiter Marpi, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Transaksi E-Commerce*, Zona Media Mandiri, Kota Tasikmalaya.

### Jurnal

- Allysthia M. Renti D, 2012, “Perdagangan Berjangka Komoditi Dan Kajian Hukum Kontrak Derivatif Forex Dan Indeks Saham Asing Dalam Industri Perdagangan Berjangka Di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-42 No.1* Januari-Maret 2012.
- Aswandi, 2019, “Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Emas Berjangka Pada PT. Rifan Financindo Berjangka Pekanbaru”, *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 4, No 2 Maret 2019, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.
- Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, 2018, “Perdagangan Berjangka Komoditi”, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

- Danastri Puspitasari dan Faiq Rizqi Aulia Rachim, 2021, “Binary Option Sebagai Komoditi Perdagangan Berjangka Di Indonesia”, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol.2 No.8, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada.
- Luthvi Febryka Nola, 2016, “Upaya Pelindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)”, *Jurnal Negara Hukum*: Vol. 7, No. 1, Juni 2016, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI”.
- Naily Suoyya, 2013, “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi Forex Margin Trading Pada Bursa Berjangka Oleh Perusahaan Pialang Berjangka”, Universitas Negri Semarang.
- Tiara Putri Asmara Lempong, 2017, “Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Berjangka Komoditi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011”, *Lex Crimen*, Vol. VI/No. 8/Okt/2017.

### **Desertasi**

Setiono, 2004, *Rule Of Law*, Disertasi, Universitas Sebelas Maret Surakarta.

### **Internet**

- CNN Indonesia, Bappebti Blokir 1.191 Situs Perusahaan pialang Tak Berizin, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210125100956-92-597924/Bappebti-blokir-1191-situs-pialang-berjangka-tak-berizin>.
- Diana Kusumasari, Pembatalan Perjanjian Yang Batal Demi Hukum, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl4141/pembatalan-perjanjian>.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, <https://kbbi.web.id/usaha>.
- Kontan*, Mengenal Konsep dan Praktik Trading Binary Option, hlm.1 <https://investasi.kontan.co.id/news/mengenal-konsep-dan-praktik-trading-binary-option-apa-itu>.
- Putu Agus Pransuamitra, Jangan Tertipu! Binomo Cs Bisa Bikin Boncos Dalam Semenit, CNBC Indonesia, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200131161127-37-134326/jangan-tertipu-binomo-cs-bisa-bikin-boncos-dalam-semenit>.
- Yohana Artha Uly, Bappebti Kembali Blokir 68 Situs Berjangka Komoditi Ilegal, Termasuk Binomo, Kompas.com, <https://money.kompas.com/read/2021/02/11/185136726/Bappebti-kembali-blokir-68-situs-berjangka-komoditi-ilegal-termasuk-binomo>.

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23.

- Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Izin Usaha Pialang Berjangka Dan Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang Pialang Berjangka, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 911.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan berusaha terintegrasi Secara Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215.
- Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 143 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5548.
- Undang-Undang Dasar 1945 perubahan kedua.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132.
- Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.